



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 1629-1639

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Penyandang Disabilitas di Desa Gunungsari, Kecamatan Pagaden

Pipit Afrianti^{1✉}, Aryanti Situmorang²

Universitas Mulawarman

Email: pipitafrianti@fisip.unmul.ac.id^{1✉}

Abstrak

Kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan aspek penting dalam mewujudkan inklusi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini menganalisis kebijakan yang diterapkan di Desa Gunungsari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, dengan fokus pada efektivitas kebijakan, program yang telah berjalan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun terdapat upaya pemerintah desa dalam mendukung penyandang disabilitas, masih terdapat kendala dalam akses informasi, keterbatasan sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara pemerintah desa dan komunitas, serta penguatan regulasi dan dukungan anggaran bagi pemberdayaan penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *Analisis, Kebijakan, Penyandang Disabilitas, Desa Gunungsari*

Abstract

Village government policies in empowering people with disabilities are an important aspect in realizing social inclusion and community welfare. This article analyzes the policies implemented in Gunungsari Village, Pagaden District, Subang Regency, with a focus on the effectiveness of the policies, ongoing programs, and challenges faced in implementation. Based on the results of the study, it was found that although there were efforts by the village government to support people with disabilities, there were still obstacles in access to information, limited resources, and community participation. This study recommends improving coordination between the village government and the community, as well as strengthening regulations and budget support for the empowerment of people with disabilities.

Keywords: *Analysis, Policy, People with Disabilities, Gunungsari Village*

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terhadap ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Kebijakan pemerintah desa memiliki peran strategis dalam memastikan mereka mendapatkan akses terhadap layanan dan kesempatan yang sama. Di Desa Gunungsari, telah diterapkan berbagai program pemberdayaan penyandang disabilitas, seperti Asistensi Sosial bagi Keluarga Penyandang Disabilitas (ASKPD) dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM). ASKPD merupakan program bantuan bagi keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas berat, sementara RBM bertujuan untuk melakukan pendataan dan pengajuan bantuan dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

Namun, meskipun berbagai program telah berjalan, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya akses informasi bagi penyandang disabilitas, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan desa. Penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, faktor apa saja yang menjadi penghambat, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitasnya. Selain itu, kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di tingkat desa juga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah sinergi antara pemerintah desa, komunitas lokal, serta lembaga sosial dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Dukungan berupa aksesibilitas fasilitas umum, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program ini. Tanpa adanya keterlibatan aktif dari berbagai pihak, program seperti ASKPD dan RBM akan sulit mencapai tujuannya secara maksimal. Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan model kebijakan inklusif yang lebih adaptif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas di perdesaan. Dengan memahami tantangan yang ada, pemerintah desa dapat merancang strategi yang lebih tepat sasaran, seperti peningkatan sosialisasi kebijakan, optimalisasi alokasi anggaran, serta penguatan peran organisasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas (Loomis, C. P., & Beegle, 1957). Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas di Desa Gunungsari. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah desa terkait pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program ASKPD dan RBM.
2. Mengidentifikasi keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan dan program pemberdayaan penyandang disabilitas.
3. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pemangku kebijakan desa, serta analisis dokumen kebijakan terkait penyandang disabilitas. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan tantangan dalam implementasi kebijakan (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Gunungsari terletak di Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, dengan jumlah penduduk yang terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Data kependudukan menunjukkan bahwa desa ini terdiri dari beberapa kelompok usia, dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan buruh industri. Tingkat pendidikan masyarakat juga bervariasi, di mana sebagian besar penduduk hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat sekolah dasar atau menengah.

Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin menunjukkan bahwa kelompok usia produktif (15–64 tahun) mendominasi jumlah penduduk, yang berpotensi menjadi tenaga kerja utama dalam pembangunan desa. Sementara itu, terdapat pula kelompok lanjut usia dan individu dengan kondisi sosial-ekonomi rentan, termasuk penyandang disabilitas, yang membutuhkan perhatian khusus dalam kebijakan sosial desa.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Desa Gunungsari tersebar di berbagai kelompok usia dan jenis disabilitas. Penyandang disabilitas yang terdata meliputi kategori disabilitas fisik, sensorik (penglihatan dan pendengaran), intelektual, serta mental. Mayoritas penyandang disabilitas di desa ini berada dalam kondisi yang membutuhkan bantuan sosial dan rehabilitasi, baik dalam bentuk pendampingan medis, alat bantu, maupun program pemberdayaan ekonomi.

Beberapa poin penting terkait kondisi penyandang disabilitas di Desa Gunungsari antara lain:

- a) Sebagian besar penyandang disabilitas berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, sehingga membutuhkan intervensi dalam bentuk bantuan sosial dan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
- b) Kurangnya fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk infrastruktur desa yang belum ramah disabilitas, menjadi kendala utama dalam mobilitas dan integrasi sosial mereka.
- c) Sebagian besar penyandang disabilitas belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan, sehingga mereka sulit memperoleh pekerjaan atau mengembangkan usaha mandiri.

Tabel 1. Data Penyandang Disabilitas di Desa Gunungsari

Jenis Disabilitas	Jumlah (Jiwa)	Persentase dari Total Penduduk (%)
Disabilitas Fisik	35	0.84%
Disabilitas Sensorik (Penglihatan/Pendengaran)	22	0.53%
Disabilitas Intelektual	15	0.36%
Disabilitas Mental	12	0.29%
Total Penyandang Disabilitas	84	2.02%

Sumber : Penelitian 2023 (Data Desa Gunungsari, 2023)

Berdasarkan table diatas, dari total 4.176 penduduk, sebanyak 84 jiwa (2.02%) merupakan penyandang disabilitas, dengan kategori disabilitas fisik sebagai yang paling dominan (35 jiwa atau 0.84%). Kelompok ini umumnya membutuhkan bantuan dalam mobilitas, alat bantu, serta rehabilitasi sosial.

Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Pemerintah Desa Gunungsari telah menerapkan berbagai kebijakan dalam upaya mendukung penyandang disabilitas agar dapat hidup lebih sejahtera dan mandiri. Berbagai program telah dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, baik dalam aspek kesejahteraan sosial, pendidikan, maupun kemandirian ekonomi. Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain:

1) Asistensi Sosial bagi Keluarga Penyandang Disabilitas (ASKPD)

Program ini merupakan bentuk bantuan sosial yang ditujukan bagi keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas berat. Bantuan yang diberikan bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas. Program ini diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan serta meningkatkan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala seperti keterbatasan jumlah penerima manfaat akibat alokasi anggaran yang terbatas, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak semua yang memenuhi kriteria dapat mengakses bantuan ini.

2) Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)

Program ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Melalui RBM, masyarakat dilibatkan dalam proses pendataan, asesmen kebutuhan, serta pengajuan bantuan bagi penyandang disabilitas. Program ini berorientasi pada pemberdayaan komunitas agar lebih peduli terhadap hak-hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendataan serta kurangnya tenaga pendamping yang memiliki kompetensi dalam bidang rehabilitasi sosial. Selain itu, belum adanya regulasi desa yang mengatur mekanisme pelaksanaan RBM secara jelas juga menjadi faktor yang menyebabkan program ini belum berjalan secara optimal.

3) Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas

Dalam upaya meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas, pemerintah desa bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti panti disabilitas dan dinas terkait, untuk menyediakan program pelatihan vokasional. Program ini mencakup berbagai jenis pelatihan, seperti menjahit, membuat kerajinan tangan, serta usaha kuliner, yang bertujuan untuk memberikan keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk berwirausaha. Selain

itu, pemerintah desa juga mendorong akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan formal dan nonformal agar mereka memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensinya. Namun, masih terdapat kendala berupa kurangnya fasilitas pendidikan inklusif di tingkat desa, minimnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas akibat stigma sosial, serta keterbatasan anggaran yang menghambat penyediaan pelatihan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Meskipun berbagai program telah diterapkan, terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Gunungsari. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi:

- a) Keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk anggaran, tenaga pendamping, maupun fasilitas yang mendukung pelaksanaan program.
- b) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas, yang menyebabkan rendahnya tingkat kepedulian dan partisipasi dalam program-program rehabilitasi dan pemberdayaan.
- c) Belum adanya kebijakan turunan di tingkat desa yang lebih spesifik, sehingga implementasi program masih belum terstruktur dengan baik dan kurang memiliki indikator keberhasilan yang jelas.

Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Lembaga Kemasyarakatan

Salah satu bentuk kemajuan dalam inklusi sosial di Desa Gunungsari adalah terpilihnya seorang penyandang disabilitas sebagai Ketua Karang Taruna desa. Pemilihan ini mencerminkan adanya perubahan pola pikir masyarakat dalam memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi dalam kepemimpinan komunitas. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa:

- 1) Penyandang disabilitas mampu berperan aktif dalam organisasi sosial jika diberikan kesempatan dan dukungan yang memadai.
- 2) Masyarakat mulai menerima dan mengakui potensi penyandang disabilitas dalam membangun desa.
- 3) Kepemimpinan penyandang disabilitas dapat menjadi model bagi desa lain dalam mewujudkan partisipasi inklusif.

Namun, masih diperlukan penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan kepemimpinan dan dukungan lebih lanjut agar partisipasi penyandang disabilitas dalam pemerintahan desa semakin optimal.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Gunungsari masih terdapat berbagai tantangan yang perlu segera diatasi agar program dapat berjalan secara optimal. Tantangan-tantangan tersebut meliputi aspek aksesibilitas informasi, keterlibatan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya dan anggaran.

1) Kurangnya Akses Informasi

Salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya akses informasi mengenai program-program bantuan yang tersedia bagi penyandang disabilitas dan keluarganya. Banyak keluarga penyandang disabilitas yang tidak mengetahui adanya program seperti ASKPD (Asistensi Sosial bagi Keluarga Penyandang Disabilitas), ASODBK (Asistensi Sosial Orang dengan Kedisabilan Berat), dan RBM (Rehabilitasi Berbasis Masyarakat) yang sebenarnya dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya akses informasi ini antara lain:

- a) Minimnya sosialisasi dari pemerintah desa. Informasi terkait program sering kali hanya disampaikan dalam rapat desa atau melalui perangkat desa tanpa adanya penyebaran informasi yang lebih luas, seperti melalui media sosial, baliho, atau selebaran yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- b) Kurangnya pendekatan langsung kepada keluarga penyandang disabilitas. Tidak semua keluarga memiliki akses terhadap pertemuan desa atau informasi digital. Beberapa keluarga penyandang disabilitas tinggal di daerah yang sulit dijangkau atau tidak memiliki perangkat komunikasi yang memadai, sehingga informasi mengenai program tidak sampai ke mereka.
- c) Tidak adanya pusat informasi khusus. Desa Gunungsari belum memiliki pusat layanan atau posko informasi yang secara khusus menangani kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga mereka kesulitan dalam mencari informasi terkait bantuan dan kebijakan yang dapat mereka akses.

Dampak dari kurangnya akses informasi ini adalah banyak keluarga penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan manfaat dari program yang telah dirancang, karena mereka tidak mengetahui bagaimana cara mengakses bantuan tersebut. Oleh karena itu, perlu ada strategi yang lebih efektif dalam penyebaran informasi, seperti melalui kunjungan

langsung ke rumah-rumah penyandang disabilitas, pelibatan kader desa dalam sosialisasi, serta penggunaan media yang lebih luas dan mudah diakses.

2) Minimnya Keterlibatan Masyarakat

Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas. Program seperti RBM (Rehabilitasi Berbasis Masyarakat) pada dasarnya dirancang agar masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu proses rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas, namun kenyataannya partisipasi warga masih sangat rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan minimnya keterlibatan masyarakat meliputi:

- a) Kurangnya kesadaran akan pentingnya inklusi sosial. Masih ada anggapan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga masyarakat cenderung pasif dan tidak merasa perlu untuk terlibat dalam mendukung kebijakan ini.
- b) Adanya stigma sosial terhadap penyandang disabilitas. Beberapa masyarakat masih memiliki persepsi bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok yang harus selalu bergantung pada bantuan, bukan sebagai individu yang dapat diberdayakan dan berkontribusi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.
- c) Minimnya program edukasi dan advokasi di tingkat desa. Tidak adanya kegiatan edukasi secara rutin yang membahas pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas menyebabkan rendahnya pemahaman warga terhadap kebijakan yang telah diterapkan.

Akibat dari rendahnya keterlibatan masyarakat ini, program RBM dan berbagai kebijakan pemberdayaan lainnya tidak dapat berjalan optimal karena kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar penyandang disabilitas. Hal ini juga berdampak pada rendahnya kesempatan penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan, mengakses pendidikan yang lebih layak, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi di desa.

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, perlu adanya kampanye kesadaran inklusi sosial yang dilakukan secara berkala, baik melalui diskusi kelompok, pelatihan, maupun penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat, organisasi desa, serta kader sosial. Pemerintah desa juga dapat bekerja sama dengan lembaga sosial atau akademisi untuk memberikan edukasi mengenai bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas.

Keterbatasan Anggaran

Alokasi dana yang terbatas menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas. Meskipun program-program seperti ASKPD, ASODBK, dan RBM telah berjalan, keterbatasan anggaran sering kali menghambat cakupan dan efektivitasnya. Beberapa aspek yang terdampak akibat keterbatasan anggaran antara lain:

- 1) Jumlah penerima manfaat yang terbatas. Tidak semua penyandang disabilitas di Desa Gunungsari dapat menerima bantuan secara rutin karena anggaran yang dialokasikan masih sangat terbatas.
- 2) Minimnya fasilitas pendukung. Kurangnya anggaran juga berdampak pada ketersediaan fasilitas rehabilitasi dan pendidikan bagi penyandang disabilitas, seperti alat bantu (kursi roda, tongkat, alat bantu dengar), serta program pelatihan kerja yang dapat meningkatkan keterampilan mereka.
- 3) Kurangnya tenaga pendamping dan fasilitator. Program rehabilitasi dan pemberdayaan membutuhkan tenaga ahli atau pendamping yang kompeten dalam menangani penyandang disabilitas. Namun, dengan anggaran yang terbatas, desa belum mampu merekrut tenaga profesional yang cukup untuk mendukung keberhasilan program ini.

Keterbatasan anggaran ini menunjukkan bahwa masih diperlukan alokasi dana yang lebih besar untuk program pemberdayaan penyandang disabilitas, baik dari APBDes maupun melalui sumber pendanaan lain seperti dana CSR perusahaan, bantuan pemerintah pusat, serta kolaborasi dengan organisasi sosial dan LSM. Selain itu, desa perlu memiliki strategi dalam menyusun perencanaan anggaran yang lebih berbasis data agar alokasi dana dapat diberikan secara tepat sasaran dan benar-benar menjangkau penyandang disabilitas yang membutuhkan.

SIMPULAN

Pemerintah Desa Gunungsari telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Keberhasilan seorang penyandang disabilitas dalam menduduki posisi Ketua Karang Taruna menunjukkan bahwa inklusi sosial di desa mulai berkembang. Dengan meningkatkan koordinasi, transparansi, dan dukungan anggaran, diharapkan kebijakan ini dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di desa.

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Gunungsari masih menghadapi tantangan besar yang meliputi kurangnya akses informasi, minimnya keterlibatan masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan antara lain:

- 1) Meningkatkan strategi sosialisasi program dengan mengadakan kunjungan langsung ke rumah penyandang disabilitas, menyebarkan informasi melalui berbagai media, serta membangun pusat layanan informasi di desa.
- 2) Mengadakan kampanye dan edukasi terkait inklusi sosial guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan penyandang disabilitas.
- 3) Meningkatkan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan dengan mengusulkan dana tambahan dari pemerintah daerah, menjalin kerja sama dengan lembaga sosial, serta memanfaatkan dana desa secara lebih efektif.
- 4) Memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, komunitas, dan lembaga sosial untuk memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar dapat memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas secara luas dan berkelanjutan.

Dengan adanya langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Gunungsari dapat berjalan lebih optimal dan berdampak positif bagi kesejahteraan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

data Desa Gunungsari. (2023).

Linton, R. (1969). *The Study Of Man*. Appleton-Century-Crofts.

Loomis, C. P., & Beegle, J. A. (1957). *Rural Social Systems: A Textbook On Community Development*. Prentice-Hall.

Merton, R. K. (1965). *Social Theory And Social Structure*. Free Press.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Robert D. Putnam. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions In Modern Italy*. Princeton University Press.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan. R&D*. Alfabeta.

Titmuss, R. (1974). *Social Policy: An Introduction*. Allen & Unwin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas

William N. Dunn. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press.